

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca Perang Dunia II, Jepang dikenal sebagai negara maju, disebut demikian di antaranya jika dilihat dari sudut pandang ekonomi yang merupakan salah satu ciri khas negara maju, mempunyai GDP (produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun) kedua tertinggi di dunia . Kemajuan Jepang tersebut salah satunya karena kontribusi dari perusahaan – perusahaan Jepang yang juga maju seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic ((Kedubes Jepang di Indonesia, 2015).

Sebenarnya kemajuan Jepang juga pernah dirasakan masyarakat Jepang pada Zaman Meiji, meskipun kemajuan tersebut sudah diupayakan pada Zaman Edo, namun baru berhasil pada Zaman Meiji (Suherman, 2004). Zaman Meiji merupakan salah satu zaman yang paling istimewa dalam sejarah Jepang. Di bawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang mengalami perkembangan yang bergerak maju, sehingga hanya dalam beberapa dasawarsa mencapai pembentukan suatu bangsa modern yang memiliki perindustrian modern dan lembaga-lembaga politik modern (Jiwapraja, 2012).

Zaman Meiji yang dimulai pada 1868 dianggap sebagai titik awal keberhasilan Jepang. Keberhasilan Jepang tidak lepas dari usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Jepang, terutama masyarakat kelas menengah dan kelas atas yang mempunyai kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang – orang Barat (Barat dalam hal ini adalah Amerika dan negara – negara Eropa), atau mengunjungi negara – negara Barat, dan menyadari betapa Jepang tertinggal. Mereka berusaha mencari tahu usaha – usaha konkret yang memungkinkan tercapainya kemajuan negara – negara Barat, kemudian mensosialisasikan usaha – usaha tersebut di Jepang.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kemajuan Jepang sudah diupayakan sejak Zaman Edo dengan berbagai kebijakan pemerintahannya. Zaman Edo adalah zaman yang dipimpin oleh keluarga Tokugawa. Disebut Zaman Edo karena pemerintahan Tokugawa berpusat di kota Edo (Tokyo). Pemerintahan Tokugawa disebut juga Tokugawa Bakufu. Pemerintah Bakufu sering juga disebut sebagai diktator militer dan berkembangnya masa feodalisme di Jepang. Namun demikian, pada masa itu juga sering disebut sebagai masa damainya Jepang karena Jepang dalam kondisi yang damai dan stabil. Pada zaman ini, Jepang tidak mengadakan kontak dengan negara lain karena pada masa itu berlaku kebijakan Politik *Sakoku*.

Sakoku adalah kebijakan penutupan negara yang dilakukan oleh pemerintah Jepang selama lebih dari 200 tahun sejak 1639 – 1854. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa orang Jepang dilarang pergi ke luar negeri dan sebaliknya orang luar dari Jepang pun tidak boleh masuk ke Jepang, kecuali pedagang lintas negara dilokalisasi di sebuah pulau buatan manusia bernama Dejima yang terletak di Teluk Nagasaki, dan itu pun dengan pembatasan yang sangat ketat. Hanya Belanda, China, Korea dan Ryukyu (sekarang Okinawa) yang diizinkan melakukan hubungan dagang dengan Jepang.

Latar belakang terjadinya kebijakan *sakoku* ini bermula ketika masa kepemimpinan Hideyoshi pada masa penyatuan Jepang pasca Jepang dilanda perang saudara, tepatnya pada Zaman Azuchi Momoyama. Pada masa kepemimpinan Toyotomi Hideyoshi inilah penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Eropa dilarang. Menurut Toyotomi Hideyoshi, kebijakannya tersebut diambil karena agama Kristen di Jepang dianggapnya telah mengganggu orientasi penyatuan negeri, dan adanya kecurigaan Hideyoshi terhadap dominasi orang – orang Eropa pada waktu itu. Kecurigaan Hideyoshi bukan tanpa alasan tapi didasarkan pada saat itu terjadi misi pelayaran Eropa terutama Portugis ke Jepang adalah *Gold, Gospel, Glory* atau mencari kekayaan, penyebaran agama dan mencari kejayaan.

Setelah Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang, kemudian muncullah penguasa baru dari keluarga Tokugawa pada masa Edo Tokugawa, yaitu Tokugawa Ieyasu setelah kemenangannya dalam Perang Sekigahara mengalahkan keluarga Mitsunari yang merupakan pendukung dari keluarga Toyotomi Hideyoshi pada 1600. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, Ieyasu memiliki pandangan yang sama dengan pendahulunya Hideyoshi mengenai pelarangan masuknya agama Kristen, yang kemudian pada masa Tokugawa ini ditetapkan menjadi peraturan nasional pada 1612.

Tokugawa Ieyasu mengeluarkan peraturan yang melarang agama Kristen masuk ke Jepang. Larangan tersebut menimbulkan pertentangan dan ketidakpuasan di kalangan orang-orang Jepang penganut agama Kristen, sehingga terjadi pemberontakan dengan nama *Shimabara no Ran*. Pemberontakan tersebut membuat Ieyasu makin memperketat peraturan sehingga orang-orang Jepang tidak diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri dan sebaliknya orang-orang Jepang yang ada di luar negeri dilarang untuk pulang ke Jepang. Sejak saat itu Jepang menutup seluruh negerinya terhadap pengaruh dari luar ini dikenal dengan sebutan negara tertutup (*Sakoku*).

Untuk mengimbangi keterasingan dari dunia luar, agar tidak tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan, masyarakat Jepang tetap mempelajari ilmu – ilmu sains, terutama yang berasal dari Belanda (*rangaku*). Materi ini juga dimasukkan dalam sistem pendidikan, tetapi kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan Belanda untuk tinggal di Dejima, tanpa masuk wilayah Jepang membuat masyarakat lebih objektif dalam menerima ilmu – ilmu dari Belanda tersebut. Pembelajaran terhadap *sains* Eropa dengan metode struktural seperti ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat tidak terkontaminasi budaya Barat dan dapat tetap menjunjung tinggi tradisi Jepang. Hal ini dapat dikatakan bahwa Jepang berhasil menyaring hal yang masuk dari luar Jepang dan berhasil membuat Jepang menjadi negara yang damai dan mengembangkan kebudayaan aslinya. Namun demikian, politik *Sakoku*, menimbulkan dampak negative bagi negara Jepang, di antaranya terjadi banyak ketertinggalan Jepang dari bangsa Barat. Hal

ini berdampak pada sikap bangsa barat yang memperlakukan Jepang dengan tidak adil dan merendahkan Jepang. Ketertinggalan tersebut, salah satunya mengakibatkan Pemerintah Tokugawa tumbang karena banyak masyarakat Jepang yang tidak puas terhadap pemerintahan akibat keputusan membuka negara, sehingga mereka melakukan kudeta kemudian digantikan oleh Pemerintah Meiji, masa itu dikenal dengan sebutan Zaman Meiji.

Sebagaimana disebutkan di atas, Zaman Meiji merupakan zaman di mana Jepang memajukan negaranya dalam berbagai bidang, termasuk bidang industri. Bidang industri di Jepang pada Zaman Edo belum begitu berkembang. Perkembangan ekonomi Jepang hanya terdiri dari industri kecil yang akan menyalurkan hasil industri ke dunia luar di Nagasaki, Osaka, dan Tokyo yaitu bandar – bandar pelabuhan. Oleh karena itu, pemerintah Meiji bertekad untuk memajukan industri untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa Barat. Lalu dengan majunya industri di Jepang. Jepang dapat menyamakan kedudukannya dengan bangsa Barat.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian bagaimana dampak kebijakan politik *Sakoku* tersebut terhadap industrialisasi pada Zaman Meiji.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

- 1.2.1 Politik *Sakoku* dilatarbelakangi kekhawatiran menyebarnya agama Kristen yang dapat mempengaruhi budaya asli Jepang.
- 1.2.2 Politik *Sakoku* menyebabkan tertinggalnya industri Jepang terhadap industri Barat.
- 1.2.3 Dampak Politik *Sakoku* terhadap kemajuan Industri di Jepang pada Zaman Meiji
- 1.2.4 Dengan tertinggalnya Jepang dalam bebrbagai bidang kehidupan dengan bangsa Barat menyebabkan Jepang direndahkan dan diperlakukan dengan tidak adil.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah dampak Politik *Sakoku* terhadap industrialisasi di Jepang pada Zaman Meiji

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1.4.1 Bagaimana kebijakan Politik *Sakoku* di Jepang ?
- 1.4.2 Bagaimana dampak Politik *Sakoku* terhadap kemajuan Industrialisasi di Jepang pada Zaman Meiji ?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1.5.1 Politik *Sakoku* di Jepang.
- 1.5.2 Dampak Politik *Sakoku* terhadap kemajuan Industrialisasi di Jepang pada Zaman Meiji.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Dampak

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1998:43), menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Dampak menurut JE. Hosio (2007:57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001:115), dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dampak adalah sama seperti yang diutarakan oleh Gory Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998:35), yaitu pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.

1.6.2 Politik

Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (*politika* – yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (*polites* – warga negara) dan (*polis* – negara kota). Menurut Ishomudin (2013:24) istilah

politik adalah serangkaian kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut suatu proses untuk tujuan – tujuan yang ingin di capai. Menurut Paramitha (2017: 1) pengertian politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan. Menurut Andrew Heywood (2007:16) politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan politik adalah kegiatan suatu bangsa dalam suatu sistem politik yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya.

1.6.3 *Sakoku*

Sakoku (鎖国 harfiah: negara terkunci / negara terrantai) adalah kebijakan luar negeri Jepang, yang mengatur bahwa orang asing yang tidak diizinkan memasuki Jepang maupun warga Jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang, dengan ancaman hukuman mati. Istilah *Sakoku* berasal dari karya sastra *Sakoku-ron* (鎖国論), yang ditulis oleh Shitsuki Tadao pada tahun 1801. Shitsuki menciptakan kata tersebut ketika sedang menerjemahkan karya-karya Engelbert Kaempfer, pengelana Jerman abad ke-17, yang bercerita mengenai Jepang (Wikipedia, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *sakoku* adalah kebijakan yang dilakukan oleh Jepang untuk menutup diri dari dunia luar.

1.6.4 **Industri**

Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau bahan yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk kedalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan (assembling) dari suatu industri (BPS, 2002). Menurut Kartasapoetra (1987) industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan menggunakan nilai yang lebih tinggi, termasuk kegiatan desain industri dan teknik industri. Menurut Sade (1985) industri adalah sebagai suatu untuk memproduksi barang jadi melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi manusia yang mengubah bahan menjadi bahan yang nilainya lebih tinggi dan dapat diproduksi dalam jumlah besar.

1.7 **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Ada pun sumber data diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari Perpustakaan Universitas Darma Persada, Perpustakaan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan *Japan Foundation* dan koleksi pribadi.

1.7 **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Politik *Sakoku* dan industrialisasi di Jepang pada Zaman Meiji dan untuk pembaca, selain dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Politik *Sakoku* dan industrialisasi Zaman Meiji. Penelitian ini juga

dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam penelitian lanjutannya.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan pemaparan tentang kebijakan Politik Sakoku di Jepang

Bab III, merupakan pembahasan tentang dampak kebijaka Politik *Sakoku* terhadap kemajuan industrialisasi Zaman Meiji di Jepang

Bab IV, kesimpulan.

